

**PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB IFRS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

SARI RATIH NUR ISTIQOMAH

NIM : 2011310106

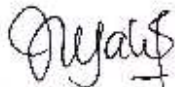
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Sari Ratih Nur Istiqomah
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 22 Mei 1993
N.I.M : 2011310106
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Keuangan
Judul : Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing
Tanggal: 16 Maret 2015



Divah Pujiati, S.E., Ak. M.Si.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal:



Dr. Luciana Spica Admilia, S.E., M.Si.

**PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB IFRS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

Sari Ratih Nur Istiqomah
STIE Perbanas Surabaya
Email : sariratihnur22@gmail.com

Diyah Pujiati
STIE Perbanas Surabaya
Email : diyah@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Implementation of accounting standart has not enough to stopped management to manipulate the financial statements. So, corporate governance is needed as control system of management's attitude to manage the company. Variables used in this study is number of board of director, the proportion of independent commissioner, the proportion of independent audit committee, managerial ownership, institusional ownership. Control variables in this study is liquidity and leverage. This study aims to determine the corporate governance based on liquidity and leverage as control variables to compliance levels of IFRS's mandatory disclosure on public manufacturing companies on the stock exchange of Indonesia. Results obtained from this study suggest that corporate governance, liquidity, and leverage as control variables have significant impact to compliance level of IFRS's mandatory disclosure on manufacturing companies go public in Indonesia Stock Exchange is being tested so that $f H_0$ rejected and H_1 accepted. To see the result of partial correlation, then the number of board of directors has the highest value. Then it can be concluded that the variable number of the board of directors is corporate governance has dominant influence on compliance levels of IFRS's mandatory disclosure.

Key words : *corporate governance structure, compliance levels of IFRS's mandatory disclosure*

PENDAHULUAN

Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap sejak 2008 hingga 2011 dengan berbagai tahap yang terdiri dari proses pengadopsian IFRS ke PSAK, persiapan infrastuktur yang diperlukan dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku pada tahun 2010, persiapan akhir infrastruktur yang dilakukan dan pengimplementasian secara bertahap pada tahun 2011 dan

pengimplentasian secara bertahap beserta pengevaluasian dampak penerapan IFRS secara komprehensif pada tahun 2012. IAI sebagai pihak yang memiliki wewenang mengenai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia mewajibkan perusahaan go public dan multinasional yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan sejak

standar tersebut berlaku secara efektif, yaitu 1 Januari 2012 (Husin, 2008).

Pada standar akuntansi berbasis IFRS ini, terdapat dua pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib (Mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (Voluntary disclosure). Pengungkapan yang bersifat wajib meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang wajib dilaporkan perusahaan kepada publik menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan. Tanpa peraturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan sehingga diperlukan peraturan mengenai hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor (Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko, 2012). Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan standar akuntansi saja belum cukup untuk menghambat manipulasi keuangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga diperlukan corporate governance yang telah dikenal sebagai sistem yang mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Masa krisis berkepanjangan yang dialami Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan isu mengenai corporate governance mulai diperhatikan di Indonesia. Lemahnya penerapan corporate governance oleh perusahaan di Indonesia menyebabkan proses perbaikan pasca krisis menjadi sangat lama sehingga baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap penerapan corporate governance (Wardhani, 2007). Struktur corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah

jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan jumlah anggota komite audit independen. Alasan pemilihan kelima indikator corporate governance tersebut adalah karena dewan direksi merupakan ujung tombak penerapan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib suatu perusahaan dengan pengawasan dari komisaris independen dan anggota komite audit independen. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang ditetapkan oleh regulator bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik saham. pemilik saham yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah manajemen dan pihak institusi. Indikator tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 10, PSAK 13, PSAK 14, PSAK 16, PSAK 23, PSAK 26, PSAK 30, dan PSAK 56. PSAK-PSAK tersebut digunakan dalam penelitian ini karena psak-psak tersebut sudah konvergen dengan IFRS dan mencakup aktivitas-aktivitas yang paling sering dilakukan di perusahaan manufaktur.

Ettredge, Johnstone, Stone, & Wang (2010) yang membahas mengenai dampak ukuran perusahaan, kualitas corporate governance, dan kabar buruk pada kepatuhan pengungkapan. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa dewan direksi, komite audit, dan kekuatan kontrol internal memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pengungkapan. Peneliti menemukan bahwa dewan dan komite audit yang lebih aktif akan mendorong kepatuhan pengungkapan yang lebih sering. Selain itu, peneliti juga menemukan hubungan positif antara kepatuhan pengungkapan dengan jumlah ahli keuangan dalam komite audit. Penelitian dengan pembahasan serupa di Indonesia dilakukan oleh Nafisah (2011), Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012), Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012), dan Pitasari & Septiani (2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan menjadi semakin efektif dengan semakin banyak proporsi anggota komisaris independen dalam suatu perusahaan sehingga pihak independen yang menuntut pelaporan keuangan perusahaan yang transparan semakin banyak menyebabkan terdapat pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS (Nasution & Setiawan, 2007). Variabel lainnya dalam penelitian seperti jumlah anggota dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris wanita, proporsi komisaris wanita, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) menunjukkan bahwa struktur corporate governance yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Menurut (Beasley, 1996), adanya komisaris yang memiliki saham perusahaan dapat meningkatkan kemampuan komisaris untuk memantau manajemen puncak secara efektif sehingga dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dikarenakan adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar (Utami, Suhardjanto, & Hartoko, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan Nafisah (2011), struktur corporate

governance yang mempunyai pengaruh positif pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit sedangkan proporsi anggota komite audit independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur karena pengungkapan yang lebih luas dan lengkap disajikan oleh perusahaan manufaktur (Cooke, 1992). Selain itu, cakupan investor yang dimiliki perusahaan manufaktur lebih luas daripada sektor industri lainnya (Renders & Gaeremynck, 2005) karena dalam kegiatannya mengandalkan modal dari investor. Dengan adanya fakta diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul adalah “Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Pengungkapan Wajib IFRS

Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS pada 1 Januari 2012. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

Terdapat 2 sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Suhardjanto dan Miranti, 2009). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan

perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan (Adina & Ion, 2008). *Mandatory disclosure* bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008).

Pengungkapan menurut Suwardjono (2005:578) merupakan bagian dari pelaporan keuangan, sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Peraturan tentang pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) telah diungkapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/Bl/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik serta Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No: Kep-346/BL/2011, tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Struktur Corporate Governance

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Bank World mendefinisikan good corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan

bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekuler sekitar secara keseluruhan. Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Effendi (2008: 2) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Struktur Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Dewan direksi memiliki tugas untuk mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Undang-undang Nomor 40 Pasal 92 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa jumlah minimal anggota direksi adalah dua orang. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan direksi dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Semakin banyak dewan direksi dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib IFRS karena direksi yang profesional akan memiliki integritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan untuk melakukan tugasnya. Selain itu direksi harus mempertanggungjawabkan keengurusannya dalam RUPS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan publik di Indonesia hanya sekedar berusaha mematuhi ketentuan dalam peraturan jumlah minimal anggota dewan direksi sehingga berapapun jumlahnya tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Menurut Pedoman Good Corporate Governance Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Butir 1-a dari Peraturan Pencatatan Efek No 1-A PT Bursa Efek Indonesia mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang Bersifat Ekuitas di Bursa menyatakan bahwa jumlah komisaris independen harus proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dapat berjalan efektif sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) didapatkan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : Proporsi Komisaris Independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Pengaruh Proporsi Anggota Komite Audit Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perihal keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 menyebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang. Keefektifan peran komite audit ini didukung oleh keberadaan komite audit independen (Nafisah, 2011). Semakin

banyak anggota komite audit independen maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut penelitian yang dilakukan Cety (2010) menunjukkan bahwa anggota komite audit independen memiliki pengaruh positif terhadap environmental performance, termasuk dalam pengungkapan informasi. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : Proporsi Anggota Komite Audit Independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen dapat menjadi lebih giat karena termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS dalam penelitian yang dilakukan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012). Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4 : Kepemilikan Manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar dorongan pengawasan terhadap kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hal tersebut karena adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 5 : Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Pengaruh Likuiditas terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Arti likuiditas menurut Harahap (2013: 301) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Semakin rendah kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari para stakeholder dimana perusahaan akan berusaha melakukan pengungkapan lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholder dan sebagian perusahaan yang lain berusaha untuk mengurangi pengungkapan informasi untuk menghindari kecurigaan para pemilik saham.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pitasari (2014) menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 6 : Likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

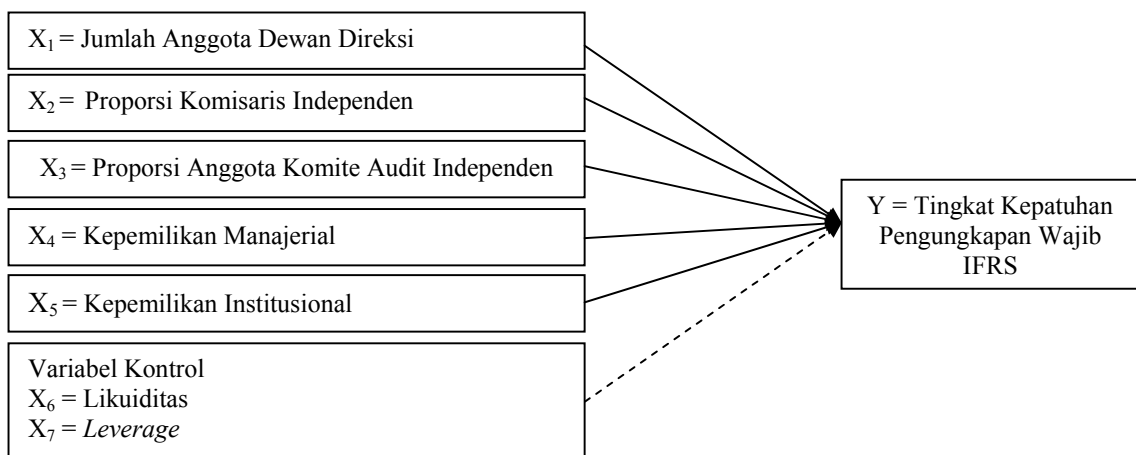
Pengaruh Leverage terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS

Arti rasio leverage menurut Harahap (2013: 307) menggambarkan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Semakin tinggi leverage yang dimiliki suatu perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari para stakeholder karena manajemen memiliki kesempatan untuk tidak mengungkapkan informasi yang akan menjadi sorotan stakeholder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) dan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 7 : Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pemilihan sampel pada tahun 2010 didasarkan karena pada tahun tersebut dilakukan proses pengadopsian IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Tahap yang terjadi pada tahun 2011 adalah persiapan akhir infrastruktur yang diperlukan dan pengimplementasian secara bertahap terhadap beberapa PSAK berbasis IFRS. Tahap pengimplementasian secara bertahap juga terjadi pada tahun 2012 dan 2013 serta dilakukan evaluasi atas dampak penerapan IFRS secara komprehensif.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan maksud untuk tujuan tertentu, yaitu mendapat sampel yang relatif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini, dimana kriterianya adalah : (a) Perusahaan manufaktur yang listed di BEI pada tahun 2010 – 2013, (b) Perusahaan menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dan berurutan tahun 2010 – 2013, (c) Laporan keuangan diterbitkan dalam mata uang rupiah.

Data Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Data-data tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dan variabel independen terdiri dari jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta variabel control yaitu likuiditas dan leverage.

Definisi Operasional Variabel

Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS

Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist yang diperoleh dari situs www.iasplus.com. Beberapa item dipilih dari checklist tersebut dan disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia dan penerapannya wajib pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Tabel 1 berikut adalah PSAK yang digunakan dalam penelitian dan jumlah item yang harus diungkapkan.

Tabel 1
PSAK yang Telah Konvergen dengan IFRS

No.	No. PSAK	Tgl. Efektif	Jumlah Item
1.	PSAK 10	01-01-12	7 item
2.	PSAK 13	01-01-12	25 item
3.	PSAK 14	01-01-09	4 item
4.	PSAK 16	01-01-08	28 item
5.	PSAK 23	01-01-11	4 item
6.	PSAK 26	01-01-12	2 item
7.	PSAK 30	01-01-12	21 item
8.	PSAK 56	01-01-12	7 item
Total item			98 item

Sumber : www.iaiglobal.or.id dan Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist

Item yang wajib diungkapkan pada tahun 2010 adalah 32 item karena hanya meliputi PSAK 14 dan PSAK 16. Item yang wajib diungkapkan pada tahun 2011 adalah

36 item yang meliputi PSAK 14, 16 dan 23. Dan item yang wajib diungkapkan pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 98 item.

Pengukuran variabel pengungkapan wajib konvergensi IFRS menggunakan teknik scoring, yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan (applicable) dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1. Jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A (Not Applicable).

$$\text{MANDSCR}_{BY} = \frac{\sum \text{SCR}_{BY}}{\sum \text{MAX}_{BY}} \times 100\%$$

Pengukuran skor pengungkapan wajib ini sesuai dengan penelitian dari Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012), dimana MANDSCR_{BY} merupakan skor pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan B pada tahun Y, SCR_{BY} merupakan jumlah item yang diungkapkan perusahaan B pada tahun Y, MAX_{BY} merupakan nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan B pada tahun Y.

Jumlah Anggota Dewan Direksi

Dalam Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia, direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan strategis dalam perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi diukur dari banyaknya anggota direksi masing-masing perusahaan, sesuai yang digunakan dalam penelitian Suhartini (2006) dan Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012).

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Indikator proporsi komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko (2012) yaitu proporsi komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah komisaris dalam suatu perusahaan di periode t.

Proporsi Anggota Komite Audit Independen

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (2006) disebutkan bahwa anggota komite audit independen merupakan anggota komite audit yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi anggota komite audit independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota komite audit independen dengan jumlah seluruh anggota komite audit yang terdaftar seperti yang digunakan dalam penelitian Nafisah (2011).

Kepemilikan Manajerial

Definisi kepemilikan manajerial menurut (El-Gazzar et.al, 2006) adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial berdasarkan penelitian Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

Kepemilikan Institusional

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Sesuai dengan Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012), kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

Likuiditas

Likuiditas merupakan pengukur besarnya kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ukuran yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Leverage

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Suhardjanto dan Miranti (2009) yaitu menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri.

$$\text{DER} = \frac{\text{utang}}{\text{modal}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Untuk menguji hubungan antara struktur corporate governance, likuiditas dan leverage terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 digunakan model regresi linear berganda.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen, maka berikut adalah persamaan regresinya:

$$\text{MANDSCR} = \alpha + \beta_1 \text{DIR} + \beta_2 \text{KOMIND} + \beta_3 \text{KOMKAI} + \beta_4 \text{KEPMAN} + \beta_5 \text{KEPINS} + \beta_6 \text{LIK} + \beta_7 \text{LEV} + e$$

Keterangan :

MANDSCR	:	Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS
DIR	:	Jumlah Anggota Dewan Direksi
KOMIND	:	Proporsi Komisaris Independen
KOMKAI	:	Proporsi Anggota Komite Audit Independen
KEPMAN	:	Kepemilikan Manajerial
KEPINS	:	Kepemilikan Institusional
LIK	:	Likuiditas
LEV	:	Leverage

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas dan leverage. Tabel 2 berikut adalah hasil uji deskriptif.

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
MANDSCR	300	0,375	0,733	0,58457	0,060455
DIR	300	2	13	4,80	2,121
KOMIND	300	0,200	0,800	0,38261	0,102949
KOMKAI	300	0,333	0,800	0,66202	0,048005
KEPMAN	300	0,000	0,256	0,02192	0,052043
KEPINS	300	0,000	0,991	0,72065	0,198482
LIK	300	0,234	247,444	3,28995	15,071408
LEV	300	-30,598	27,977	1,20182	3,394486

Sumber : Data diolah

Rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yang dilakukan perusahaan manufaktur sebesar 0,58457 atau 58,57 persen. PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. melakukan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS paling rendah pada tahun 2012 dengan tingkat kepatuhan sebesar 0,375 atau 37,5 persen sedangkan perusahaan yang melakukan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS paling tinggi adalah PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. dengan tingkat kepatuhan sebesar 0,733 atau 73,3 persen pada tahun 2011. PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk. memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan paling rendah dikarenakan item-item yang disyaratkan untuk diungkapkan banyak yang tidak diungkapkan, yaitu item yang terkait dengan properti investasi, biaya pinjaman, dan sewa.

Rata-rata variabel jumlah anggota dewan direksi sebesar 4,80 dengan standar deviasi 2,121 menunjukkan bahwa data yang digunakan merupakan data homogen. Nilai minimum sebanyak 2 anggota menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki paling sedikit 2 orang anggota dewan direksi. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu UU No. 40 Pasal

92 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa jumlah anggota dewan direksi paling minimum sebanyak 2 orang. Sebanyak 7 perusahaan memiliki jumlah anggota dewan direksi paling minimum yaitu hanya 2 anggota dewan direksi. Perusahaan tersebut adalah PT. Akasha Wira International Tbk., PT. Alam Karya Unggul Tbk., PT. Berlina Tbk., PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk., PT. Pelangi Indah Canindo, PT. Sekawan Inti Pratama Tbk., PT. Tirta Mahakam Resources Tbk. Jumlah anggota dewan direksi paling maksimum sebanyak 13 orang dimiliki oleh PT. Mandom Indonesia Tbk.

Proporsi komisaris independen dengan periode penelitian selama 4 tahun memiliki nilai minimum sebesar 0,2 atau 20 persen dan nilai maksimum sebesar 0,8 atau 80 persen. Rata-rata proporsi komisaris independen selama 4 tahun sebesar 0,383 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki proporsi dewan komisaris independen di atas 30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI telah memenuhi ketentuan BEI tentang dewan komisaris independen, yaitu batas minimal proporsi dewan komisaria independen 30 persen. Standar deviasi dari yang berada di bawah nilai rata-rata yaitu 0,103 menunjukkan bahwa data yang

digunakan dalam penelitian merupakan data homogen atau tidak terdapat variasi data yang terlalu mencolok. Nilai proporsi komisaris independen paling minimum pada tahun penelitian 2010-2013 ini yaitu PT. Tunas Ridean Tbk. dan PT. Voksel Elektrik Tbk sedangkan nilai proporsi komisaris independen paling maksimum pada tahun penelitian 2011-2013 ini yaitu PT. Unilever Tbk.

Proporsi anggota komite audit independen dengan periode penelitian selama 4 tahun memiliki nilai minimum sebesar 0,33 atau 33 persen dan nilai maksimum sebesar 0,80 atau 80 persen. Rata-rata proporsi anggota komite audit independen selama 4 tahun sebesar 0,66202 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki proporsi anggota komite audit diatas 60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI telah memenuhi ketentuan BEI tentang anggota komite audit independen, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang termasuk ketua komite audit yang juga merangkap sebagai anggota komisaris independen. Standar deviasi dari data ini yang berada di bawah nilai rata-rata sebesar 0,048005 menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian merupakan data homogen. Nilai proporsi anggota komite audit paling minimum dimiliki oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2013 sebesar 0,333 sedangkan nilai proporsi anggota komite audit paling maksimum dimiliki oleh PT. Tunas Ridean Tbk. dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2013 sebesar 0,800.

Kepemilikan Manajerial (KEPMAN) selama 4 tahun periode pengamatan memiliki nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,256 atau 25,6 persen. Rata-rata KM selama 4 tahun sebesar

0,02192 atau 2,192 persen dengan sebaran data sebesar 0,052032. Standar deviasi yang berada di atas nilai rata-rata menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah data heterogen. Nilai KM yang paling maksimum pada tahun penelitian 2010-2013 ini yaitu PT. Lion Mesh Prima Tbk. dan terdapat 39 perusahaan yang kepemilikan sahamnya tidak dimiliki oleh pihak manajemen selama periode penelitian.

Kepemilikan Institusional (KEPINS) selama 4 tahun periode pengamatan dengan jumlah sampel (N) sebanyak 300 perusahaan manufaktur, memiliki nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,991. Rata-rata KI selama 4 tahun menunjukkan nilai 0,72139 dengan standar deviasi sebesar 0,198482. Nilai rata-rata yang berada di atas nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian merupakan data homogen. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham perusahaan manufaktur cenderung dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan Institusional paling kecil dimiliki oleh PT. Intanwijaya Internasional Tbk. pada tahun 2013 sebesar 0,000 sedangkan kepemilikan institusional paling besar dimiliki oleh PT. Bentoel International Investama Tbk. sebesar 0,991 atau 99,1 persen.

Nilai rata-rata rasio lancar untuk tahun penelitian 2010-2013 yaitu sebesar 3,28995 sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel penelitian berada dalam kondisi yang likuid atau aset lancarnya mampu menutup kewajiban lancarnya. Standar deviasi dari data likuiditas periode penelitian 2010-2013 sebesar 15,071408. Nilai standar deviasi yang berada jauh di atas nilai rata-rata menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian merupakan data homogen. Nilai rasio lancar tertinggi adalah PT. Jaya

Pari Steel Tbk. pada tahun 2013 sebesar 247,444 kali sedangkan nilai rasio lancar terendah adalah PT. Alam Karya Unggul Tbk. sebesar 0,234 kali.

Nilai rata-rata rasio utang atas modal untuk tahun penelitian 2010-2013 yaitu sebesar 1,20182 sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel penelitian lebih banyak menggunakan dana dari utang dibandingkan dengan modal miliknya sendiri. Standar deviasi dari data *leverage* periode penelitian 2010-2013 sebesar 3,394486. Nilai standar deviasi yang berada di atas nilai rata-rata menunjukkan

bahwa data yang digunakan dalam penelitian merupakan data homogen. Nilai rasio utang atas modal tertinggi dimiliki oleh PT. APAC Citra Centertex Tbk. pada tahun 2011 sebesar 27,977 sehingga bisa dikatakan keadaan perusahaan sedang tidak baik karena pendanaan lebih banyak diperoleh dari utang. Sedangkan nilai rasio utang atas modal terendah dimiliki oleh PT. APAC Citra Centertex Tbk. pada tahun 2012 sebesar -30,598 sehingga bisa dikatakan keadaan perusahaan dalam kondisi yang sangat baik karena pendanaan lebih banyak diperoleh dari modal.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Sig
Constant	0,634	0,000
DIR	0,006	0,001
KOMIND	-0,026	0,455
KOMKAI	-0,090	0,214
KEPMAN	-0,030	0,697
KEPINS	-0,012	0,537
LIK	0,000	0,369
LEV	0,001	0,153
R	0,234	
R Square	0,055	
Adjusted R Square	0,032	
F	2,424	
Sig F	0,020	

Sumber : Data diolah

Jumlah anggota dewan direksi memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena signifikansi kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Prawinandi (2012) dimana pada penelitian ini menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Dikatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia hanya

sekedar berusaha mematuhi ketentuan dalam peraturan jumlah minimal anggota dewan direksi sehingga berapapun jumlahnya tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Kenaikan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib juga dapat terjadi karena direksi pada perusahaan publik tersebut memiliki integritas dan pengalaman serta kecakapan untuk melakukan tugasnya. Selain itu, dewan direksi merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas apa yang terjadi

dalam suatu perusahaan sehingga jika terjadi penyimpangan dalam suatu perusahaan yang diperiksa pertama kali oleh regulator adalah dewan direksi. Karena itulah dewan direksi berupaya untuk memenuhi ketentuan regulator dalam mencapai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Proporsi komisaris independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Prawinandi (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan Utami (2012), Nafisah (2011), dan Pitasari (2014) sejalan dengan hasil penelitian ini yang juga menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Peran komisaris independen dan regulator sebenarnya hampir sama yaitu untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan memastikan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang ditetapkan oleh regulator telah diterapkan dalam perusahaan. Hanya saja, peran komisaris independen dalam suatu perusahaan menjadi kurang maksimal karena jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan anggota komisaris yang berasal dari internal perusahaan. Selain itu, pemegang saham lebih suka mempercayakan perusahaannya kepada komisaris dari internal perusahaan itu sendiri yang dianggap mengetahui seluk beluk perusahaan secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Proporsi anggota komite audit independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafisah (2011). Alasan mendasar atas hal ini dapat disebabkan karena anggota komite audit tidak dipilih secara jelas dan terbuka sehingga tingkat independensinya dipertanyakan (Mintara, 2008). Selain itu, masih banyaknya perusahaan yang memilih anggota komite audit independen hanya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bukan untuk kepentingan perusahaan sehingga anggota komite audit independen kurang bisa menjalankan tugasnya secara efektif.

Kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utami (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan Sari Wulan (2013) sejalan dengan hasil penelitian ini yang juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Alasan mendasar atas hal ini dapat disebabkan karena masih minimnya penerapan kepemilikan saham oleh manajemen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia. Kepemilikan manajerial hanya diterapkan pada 17 perusahaan dari 75 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Selain itu, manajemen dapat mengetahui informasi mengenai perusahaan secara langsung tanpa harus menganalisis laporan keuangan dan laporan tahunan yang

diterbitkan perusahaan (Nuryaman, 2009). Dengan demikian, kepemilikan manajerial belum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan Sari Wulan (2013) sejalan dengan hasil penelitian ini yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini disebabkan karena pihak institusi sebagai pemilik tidak begitu memperhatikan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan tetapi lebih memperhatikan informasi-informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Selain itu, pihak institusi sebagai pemilik merasa tidak bertanggung jawab terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib karena hanya menggunakan hasil akhir dari laporan keuangan dan bukan sebagai pembuat laporan keuangan.

Likuiditas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pitasari (2014) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini dapat terjadi karena item pengungkapan yang berhubungan dengan likuiditas hanya persediaan dan pendapatan. Sedangkan item

pengungkapan lainnya seperti biaya pinjaman, laba per saham, sewa, aset tetap, properti investasi tidak berhubungan dengan likuiditas. Hal ini diduga menjadi penyebab tidak adanya pengaruh likuiditas terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Leverage tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS karena signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi dan Utami (2012) dan Pitasari yang menyatakan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini dikarenakan pihak eksternal seperti institusi keuangan – bank yang berfungsi sebagai kreditur tidak mengandalkan laporan keuangan yang dibuat perusahaan tetapi lebih sering mengetahui informasi secara langsung sehingga tingkat *leverage* yang tinggi juga tidak mendorong pengungkapan wajib yang lebih tinggi (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa corporate governance yang terdiri dari jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional serta likuiditas dan leverage sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Diduga likuiditas dan leverage sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Uji Parsial (Uji t), maka dapat disimpulkan hanya jumlah anggota dewan direksi yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS sedangkan proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas dan leverage mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansi dari proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas dan leverage, dimana hasilnya menyebutkan bahwa signifikansi $> 0,05$. Sedangkan untuk jumlah anggota dewan direksi, dimana hasilnya menyebutkan bahwa signifikansinya $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Dengan melihat korelasi parsial (r^2), maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota dewan direksi mempunyai nilai tertinggi yaitu 0,035721. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Dengan melihat R square yaitu 0,055 maka perubahan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas dan leverage sebesar 5,5 persen dan sisanya sebesar 94,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan (1) Subyektifitas peneliti dalam memahami data laporan tahunan sangat mempengaruhi interpretasi peneliti dalam mengukur jumlah pengungkapan informasi variabel yang diperlukan, (2) Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk jenis industri atau perusahaan lain karena tiap perusahaan belum tentu mengungkapkan item yang sama karena kepatuhan tiap perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan item maksimal pada IAS yang dapat diterapkan, (3) Terdapat korelasi positif dalam model regresi linier yang digunakan dalam penelitian yang jika dipulihkan dapat mengubah data penelitian.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel yang terkait seperti *corporate governance* yang dapat dilihat dari aspek aktivitas rapat komite audit dan rapat dewan komisaris, peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan regulasi terbaru yang terkait dengan variabel penelitian, dan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dan pelegalan PSAK seperti IAI sebaiknya melegalisasi item-item wajib yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan sehingga akan didapat hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adina, P., dan P. Ion. 2008. "Aspects Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure". *Annals Faculty of Economics Journal* 3 (1): 1407-1411.
- Al-Mutawaa, A. dan A.M. Hewaidy. 2010. *Disclosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Kuwaiti Companies. The International Business and*

- Economics Research Journal 9 (5): 33.
- Beasley, M.S. 1996. "An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review* 71 (4): 443-465.
- Cety, Theodora. 2010. "Corporate Governance, Environmental Performance dan Environmental Disclosure di Indonesia". Skripsi Sarjana tak diterbitkan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Cooke, T., 1992. "The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporation". *Accounting and Business Research* , 22 (87), 229-237.
- Deloitte Touche Tohmatsu. 2010. International Financial Reporting Standards. Presentation and Disclosure Checklist 2010. <http://www.iasplus.com/fs/2010ifrschecklist.pdf>. 15 Oktober 2014.
- _____. 2011. International Financial Reporting Standards Presentation and Disclosure Checklist 2011. <http://www.iasplus.com/fs/2011ifrschecklist.pdf>. 15 Oktober 2014
- _____. 2012. International Financial Reporting Standards Presentation and Disclosure Checklist 2012. <http://www.iasplus.com/fs/2012ifrschecklist.pdf>. 15 Oktober 2014
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Sekertariat Negara.
- El-Gazzar, S.M., J.M. Fornaro dan R.A. Jacob. 2006. An Examination of The Determinants and Contents of Corporate Voluntary Disclosure of Management's Responsibilities for Financial Reporting. Lubin School of Business Working Paper.
- Ettredge, M., K. Johnstone, M. Stone dan Q. Wang. 2010. "The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance". *Review of Accounting Studies*, Forthcoming: 1-34.
- Husin, E. Z. 2008. 51 Tahun IAI & Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia ke International Financial Reporting Standards (IFRS). *Majalah Akuntan Indonesia*. Edisi No. 14/Tahun III/Februari.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012. Jakarta : Salemba Empat.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. http://www.cicfcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf. Diakses 10 Oktober 2014.
- Mintara, Y. H. 2008. "Pengaruh Implementasi Corporate Governance terhadap Pengungkapan Informasi". Skripsi Sarjana tak diterbitkan. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Muh Arief Effendy. 2008. *Power Of Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafisah, U. 2011. "Peran Corporate Governance Dalam Kepatuhan Pengungkapan Wajib: Studi Empiris Badan Usaha Milik Negara". Skripsi Sarjana tak diterbitkan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nuryaman., 2009. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukareka". *Jurnal*

- Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6(2): 89-116.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. 2007. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi X, (hal. 1-26). Makassar.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., dan H. Triatmoko. 2012. "Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS". Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Pitasari, A., dan Aditya Septiani. 2014. "Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif". Diponegoro Journal Of Accounting, 3(2) : 1.
- Renders, A., dan Gaeremynck, A. 2005. "Legal and Voluntary Investor Protection and Early IFRS-adoption: A Study of European Economies". *De Economist* , 1 (155), 49-72.
- Septiani, A. 2005. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang: Perspektif Teori Pengungkapan". Tesis tak diterbitkan. Universitas Diponegoro.
- Sofyan Syafri Harahap. 2013. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhardjanto, D. dan L. Miranti. 2009. "Praktik Penerapan Indonesian Environmental Reporting Index dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 13 (1): 63-77.
- Suhartini, D. 2006. "Pengaruh Leverage, Jumlah Dewan Direksi, Reputasi Auditor dan Persentase Saham yang Ditawarkan Pada Publik Saat IPO Terhadap Earning Management". *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6 (2): 64-75.
- Sujono dan Soebiantoro, Ugy. 2007. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 9(1). 43-47.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta : BPFE.
- Tarjo. 2008. "Pengaruh Konsentrasi Struktur Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham Serta Cost Of Equity Capital". Simposium Nasional Akuntansi XI. 1-56. Pontianak: Universitas Tanjungpura
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., dan S. Hartoko. 2012. "Investigasi Dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance". Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Wardhani, R. 2007. "Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 4 No.1. 95-114
- Wulan, Sari. 2013. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Disclosure." Skripsi Sarjana tak diterbitkan. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.